

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 1950, hubungan bilateral Indonesia-Jepang terjalin yang diawali dengan pembahasan penggantian kerugian yang terjadi pada masa penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Langkah awal yang diambil oleh Indonesia dalam mempermudah wacana pemapasan perang adalah dengan membangun kantor perwakilan negara di Tokyo, Jepang. Hubungan bilateral Indonesia-Jepang semakin erat semenjak adanya Perjanjian Damai dengan Jepang tahun 1958. Indonesia merupakan mitra penting dalam kerja sama ekonomi, politik ataupun budaya Jepang dalam melaksanakan dan meningkatkan kepentingan nasional negaranya. Dalam hal ini kerja sama Indonesia-Jepang berada dalam bidang pertekstilan, mesin, konstruksi, logam, dan perjilidan buku/majalah, selain itu salah satu sektor kerjasamanya adalah kerja sama dalam bidang ketenagakerjaan yang dimulai pada tahun 1994. Pada tahun 2007, kerja sama Indonesia-Jepang diperkuat melalui *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*.

Jepang memiliki tiga prinsip dasar aturan dan standarisasi dalam ketenagakerjaan yang

bersifat baku yaitu, pekerjaan seumur hidup, pengupahan berdasarkan senioritas, dan serikat pekerja berbasis korporasi yang kemudian menjadikan Jepang sebagai *Advanced Industrial Country*. Dalam era globalisasi Jepang merupakan negara maju yang memimpin perekonomian internasional, hal ini berhasil diterapkan semenjak Jepang berhasil bertransformasi menjadi negara industri maju (*Advanced Industrial Country*) yang didasari dengan melakukan restorasi meiji. Terutama di bidang industri alat elektronik dan otomotif. Jepang merupakan negara kedua didunia dengan kedudukan tertinggi dari barang dan jasa yang dihasilkan negaranya dalam setahun yaitu produk domestik bruto (GDP Jepang) dengan merk-merk terkenal seperti Panasonic, Sony, Toyota, dan Fujifilm.

Hilangnya batas teritorial pada era globalisasi berdampak pada interaksi antar negara dengan negara lainnya, baik dalam interaksi ekonomi maupun sosial dan transaksi beserta interaksi para pelaku ekonomi di seluruh negara di dunia ini disebabkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan aplikasi teknologi terapan yang berkembang pesat. Pada era globalisasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah hal yang harus dilakukan mengingat SDM merupakan komponen yang berperan aktif dalam pembangunan ekonomi. Pemagangan atau mengirimkan tenaga kerja

keluar negeri dengan melalui proses pelatihan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM.

Program nasional yang diupayakan oleh pemerintah yang dalam hal ini dilimpahkan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan menempatkan tenaga kerja ke luar negeri dengan harapan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat atau tenaga kerja, yang kemudian diatur dalam keputusan menteri nomer KEP104A/MEN/20012. Sistem ketenagakerjaan Indonesia diatur dalam UU Ketenagakerjaan yang di dalamnya mengatur empat ketentuan pokok, yaitu kebijakan upah minimum, ketentuan PHK, ketentuan hubungan kerja dan ketentuan jam kerja. Akan tetapi di UU ketenagakerjaan Indonesia ada UU yang mengatur tentang sistem *outsourcing* (alih daya) yang mana hal ini mengakibatkan status hukum antara perusahaan dan pekerja tidak rigid atau tidak jelas karena perusahaan tidak bertanggung jawab langsung terhadap pekerja *outsourcing* melainkan pihak yang bertanggung jawab adalah perusahaan penyedia tenaga kerja *outsourcing*. Dengan memanfaatkan pasar tenaga kerja internasional, penempatan tenaga kerja dinilai mampu untuk meningkatkan kualitas yang nantinya akan mendapatkan perlindungan yang optimal dimulai sejak sebelum keberangkatan hingga kembali lagi ke Indonesia.

Pengiriman TKI ke Jepang menggunakan sistem *Government to Government* (G to G), Permintaan tenaga kerja Indonesia oleh pemerintahan Jepang merupakan salah satu poin yang tertuang dalam EPA (*Economic Partnership Agreement*) (Ta, 2008). Perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia dan Jepang (*Economic Partnership Agreement*) EPA menandakan adanya peluang tersendiri bagi Indonesia dalam upaya meningkatkan ekonomi yang lebih baik dengan memanfaatkan investasi dan perdagangan internasional. Akhir November 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyepakati serangkaian kerja sama yang dirangkum dalam bingkai *Economic Partnership Agreement* (EPA). Secara keseluruhan, EPA kedua negara mencakup 13 pasal, yang bila diperas hanya menyangkut tiga hal, yakni mengenai Fasilitasi perdagangan dan investasi, liberalisasi, dan kerjasama. Sebagai salah satu negara maju, untuk dapat menembus lapangan pekerjaan ke Jepang bukanlah hal yang mudah. Persaingan yang sangat ketat dan selektif serta persyaratan yang dinilai sangat rumit dibandingkan dengan negara lain merupakan alasan yang mendasari tidak mudahnya menjadi tenaga kerja ke Jepang. Pengiriman tenaga kerja ke Jepang, menggunakan sistem magang atau masa *trainee*. Program ini bersifat *apprentice* dikarenakan para peserta akan mulai bekerja dengan sistem magang dan masuk ke dalam

perusahaan-perusahaan industri, yang kemudian peserta magang akan bersaing dengan para peserta dari berbagai negara lain.

Salah satu kerja sama antara Indonesia dan Jepang adalah IM Japan, yang pertama kali dibentuk pada Desember 1991, program ini merupakan program yang menerima pekerja muda dari negara berkembang sebagai pemegang di Jepang dengan periode waktu yang ditentukan. Kerja sama dalam pengembangan SDM ini mulai dilaksanakan sejak tahun 1993 oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. dengan IM Japan. Diamandemen kembali pada Pebruari 2010 oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Presiden Direktur IM Japan Kyoie Yanagisawa. Program pemagangan yang dimiliki oleh Indonesia terbagi menjadi 2 versi, yaitu program pemagangan IM Jepang dan non IM Jepang. Pada program IM Jepang (*International Management Development Organization*) berdasarlan MOU yang secara resmi ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai penyelenggara dan bertanggung jawab dalam program pemagangan ini yang berkerja sama dengan *International Manpower Development Organization*, Japan (IM Japan) yang dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* antara Depnakertrans RI dengan IM Jepang yang pada kala itu yang mencakup

program persiapan, rekrutmen, seleksi, pelatihan pra pemberangkatan di Indonesia, pelatihan di Jepang, pembiayaan dan pasca magang.

Sejak tahun 1993, IM Japan dalam bentuk “Sistem Keterampilan” yang telah dibentuk oleh pemerintah Jepang telah menerima sumber daya manusia dengan jumlah besar yang sebelum diberangkatkan ke Jepang telah melalui seleksi yang sangat ketat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sebelumnya para peserta diseleksi terlebih dahulu oleh pemerintah Indonesia dengan menanamkan sifat disiplin yang tinggi, semangat yang kuat dan jasmani yang mendukung. Jumlah tersebut belum termasuk dari tahun 2010 sampai 2015. Pada tahun 2010 sampai 2015 terjadi peningkatan pengiriman sumber daya manusia Indonesia ke Jepang sebesar 19,195 pertumbuhan dalam pengiriman dua kali lebih cepat dalam 5 tahun pencapaian (Fahreza, 2018). Selama ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Ketenagakerjaan Daerah setempat membantu untuk memfasilitasi pengurusan program magang ke Jepang ini dengan baik, walaupun masih terdapat kendala dari Dinas Ketenagakerjaan, contohnya dari Dinas Kertenagakerjaan Bali yang merupakan salah satu sumber atau potensi besar dalam program ini, mengalami penurunan jumlah tenaga kerja yang dikirim karena sebagian besar calon peserta lebih memilih untuk bekerja di kapal pesiar.

Kegagalan peserta dalam menjalankan program ini biasanya terjadi akibat adanya masalah kesehatan peserta seperti kecelakaan lalu lintas, peserta melakukan pelanggaran yang termasuk dalam sikap dan disiplin selama masa pelatihan dan juga masalah lainnya yang dapat membatalkan peserta untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Menurut Permenaker Nomor 08 tahun 2008, hanya mengatur mengenai perlindungan asuransi peserta pemagangan di luar negeri terhadap kecelakaan kerja, kesehatan, kematian yang preminya ditanggung oleh penyelenggara dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tempat dilaksanakannya pemagangan, namun tidak mengatur perlindungan bagi peserta yang mengalami kecelakaan maupun gangguan kesehatan dan kematian di negara asalnya. Oleh karena itu masalah kegagalan IM Japan ini dapat dikatakan bahwa masalah yang terjadi didasari dari oleh sistem koordinasi antara pusat dan daerah serta masalah mengenai daerah dari masing-masing peserta yang belum menyediakan anggaran khusus untuk perlindungan peserta yang selanjutnya masalah ini mengakibatkan program magang tidak terlaksana dengan baik.

Penelitian ini akan membahas mengenai alasan mengapa Jepang masih melanjutkan kerja sama sebagai mitra dalam pengembangan sumber daya manusia melalui *International Manpower*

Development Organization Japan (IM Japan), padahal terdapat beberapa kendala yang menghambat jalannya program ini.

B. Rumusan Masalah

“Mengapa Jepang masih melanjutkan kerja sama sebagai mitra dalam pengembangan sumber daya manusia melalui *International Manpower Development Organization Japan* (IM Japan) padahal terdapat beberapa kendala yang menghambat jalannya program ini?”

C. Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Untuk dapat menganalisa masalah hingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada maka digunakan rumusan pemikiran sebagai berikut :

1. Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional ialah perilaku dasar suatu negara dalam hubungan luar negeri. Didalam hubungan internasional terdapat komponen yang menjadi dasar dalam kepentingan nasional, yaitu aktor, kekuasaan dan kepentingan. Dari ketiga komponen tersebut menciptakan atau membentuk kepentingan nasional sebagai identitas negara. Dan sebelum negara mendapatkan identitas, komponen tersebut harus dikembangkan satu persatu. Dalam hal ini aktor didalam hubungan internasional berperan sebagai pelaku atau penggerak yang menciptakan

hubungan diplomasi antar negara. Tetapi dari tindakan yang dilakukan oleh aktor tersebut memiliki tujuan yang nantinya akan mengarah kepada pembentukan kepentingan nasional suatu negara. Pada suatu perilaku politik luar negeri yang berlandaskan kepentingan nasional maka merujuk kepada upaya-upaya untuk mendapatkan atau mengejar kekuasaan atau *power*. Kepentingan nasional dalam hubungan internasional merupakan konsep yang mendasar. Untuk menentukan perilaku suatu negara konsep kepentingan nasional sangat berperan aktif. Karena fungsi dari kepentingan nasional adalah sebagai panduan didalam hubungan luar negeri antar negara dan sebagai patokan pemerintah untuk mengevaluasi kinerja didalam hubungan luar negeri. Dan dalam kebijakan yang diberlakukan oleh negara seringkali menjadikan kepentingan nasional sebagai pembenaran.

Menurut Hans J Morgenthau, kepentingan nasional adalah alat yang digunakan untuk mencapai kekuasaan, karena menurutnya kekuasaan merupakan kekuatan yang nantinya dapat mengontrol negara lain. Kemudian dapat disimpulkan bahwa konsep kepentingan nasional adalah kemampuan negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur negaranya dari gangguan negara lain (Morgenthau, 1978). Menurut T.May Rudy, kepentingan nasional adalah suatu tujuan yang ingin dicapai yang berhubungan dengan

kebutuhan bangsa/negara ataupun berhubungan dengan hal yang menjadi cita-cita suatu negara. Hal yang paling relatif tetap dan selalu sama dalam kepentingan nasional suatu bangsa/negara adalah keamanan yang mencangkup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah negaranya dan kesejahteraan. Dan dua hal pokok tersebut yaitu keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*) merupakan dasar atau alat dalam merumuskan kepentingan nasional suatu negara (Rudy, 2002). Selain itu, menurut Felix E. Oppenheim (1987), pengertian kepentingan internasional adalah tujuan pemerintah nasional didalam hubungan luar negeri atau level internasional untuk membangun kesejahteraan negaranya. Dan mengindigasikan bahwa kepentingan nasional merupakan proses dalam tahap hubungan internasional untuk kesejahteraan negaranya dengan menjaga otonomi politik dan integrase negaranya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional merupakan cita-cita suatu negara dalam menjalin hubungan internasional yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan rakyat/negaranya.

Dalam mencapai kepentingan nasional, suatu negara harus menetapkan kebijakan-kebijakan luar negeri yang berfungsi sebagai pengaturan dan sebagai arah dalam hubungan internasional. Kepentingan nasional merupakan suatu wujud yang selalu dapat berubah. Hal ini didasari dari pengaruh perubahan kondisi domestik dalam proses pembuatan kebijakan yang

juga selalu berubah, kondisi politik dan keamanan internasional sebagai faktor eksternal juga selalu berubah. Kepentingan nasional suatu negara merupakan keputusan yang diambil oleh negara yang harus memperhitungkan atau mempertimbangkan kesejahteraan rakyatnya dan harus dipikirkan secara matang. Kepentingan nasional juga memiliki bentuk lain yang seperti *warm-water ports*, membangun hubungan diplomatis dengan negara lain, memiliki wewenang membangun fasilitas militer di negara lain, dan kepentingan lain yang dapat mendukung diplomasi suatu negara. (Clinton, 1986).

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional negaranya, seperti mengembangkan program yang dibuat oleh pemerintah negaranya, melanjutkan pembangunan yang bersifat berkelanjutan, ataupun melakukan kerja sama internasional. Suatu negara membutuhkan kepentingan nasional sebagai alasan untuk melanjutkan hubungan internasional antar negara lainnya. Dalam hal ini negara dan juga kepentingan internasional adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau artinya adalah kesatuan yang saling berhubungan. Di dunia internasional, suatu negara pasti akan membawa masing-masing misinya untuk melakukan interkasi dengan yang lain. Dan negara merupakan pembawa visi dan misi dari kepentingan nasional yang harus tercapai dan terakomodasi dengan jangka waktu yang efisien.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat menghasilkan pendekatan dari adanya kepentingan nasional negara Jepang yang mengarahkan untuk membentuk kerja sama antara Jepang dengan Indonesia yang menghasilkan kesepakatan bersama untuk mengembangkan sumber daya manusia dari masing-masing negara yang terlibat. Dan dalam kerja sama pembangunan sumber daya manusia ini, Jepang memiliki kepentingan nasional yaitu mempertahankan stabilitas pembangunan ekonomi negaranya, investasi ekonomi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang menjadi alat sebagai pembangunan industri negaranya serta nantinya akan diperkerjakan dibawah pertanggungjawaban kerja sama IM Japan melalui program pemagangan yang bertujuan untuk membangun perekonomian negara.

2. Teori Pembuatan Keputusan (*Decision-Making*)

Pembuatan keputusan adalah suatu proses yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Menurut Richard C. Snyder terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan seperti faktor eksternal dan faktor internal. Hal utama yang dapat dilakukan untuk menganalisa kebijakan luar negari suatu negara menurut Snyder adalah dengan mengamati proses selama pembuatan keputusan. Keputusan yang diambil pada akhirnya merupakan satu titik tolak

dari suatu negara untuk memulai kebijakannya baik di dalam negeri maupun terhadap negara lain. Proses pembuatan keputusan menurut Snyder memiliki tujuan utama yaitu dengan melihat dari keputusan yang diambil suatu negara dapat menjadi kaca mata untuk memahami politik internasional. Atau bisa dijabarkan untuk mengetahui apakah keputusan yang diambil akan mempengaruhi hasilnya atau sebaliknya. Dan untuk mengetahui apakah perbedaan proses pembuatan keputusan akan menghasilkan keputusan yang berbeda dan apakah keterlibatan individu atau kelompok dapat mempengaruhi suatu hasil keputusan.

Asumsi dasar teori pengambilan keputusan Snyder yaitu bahwa segala tindakan internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan yang dibuat oleh pelaku politik domestik, dimana para pemimpin negara (baik secara individu ataupun kelompok) bertindak sebagai aktor utama dalam proses pengambilan keputusan (Jensen, 1982: 7). Teori pengambilan keputusan Snyder menunjukkan bahwa faktor apapun yang bersinggungan dengan politik luar negeri akan diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan (*decision-makers*). Orang yang bertanggungjawab adalah ia yang berperan sebagai pembuat keputusan dan dengan melihat siapa yang menjadi pembuat keputusan dapat memahami mengapa

keputusan tersebut diambil. (Snyder e.al. dalam Varma, SP, 2010: 392).

Faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi keputusan kebijakan menurut Snyder adalah faktor eksternal seperti kondisi dan faktor yang berbeda diluar batas- batas suatu negara, seperti aksi dan reaksi dari negara lain, lingkungan non-manusia, budaya-budaya lain, maupun masyarakat lainnya diluar teritori suatu negara, sedangkan untuk faktor internalnya meliputi, masyarakat dalam suatu negara, lingkungan manusia seperti populasi dan budaya dalam negara tersebut dan juga lingkungan non-manusia.

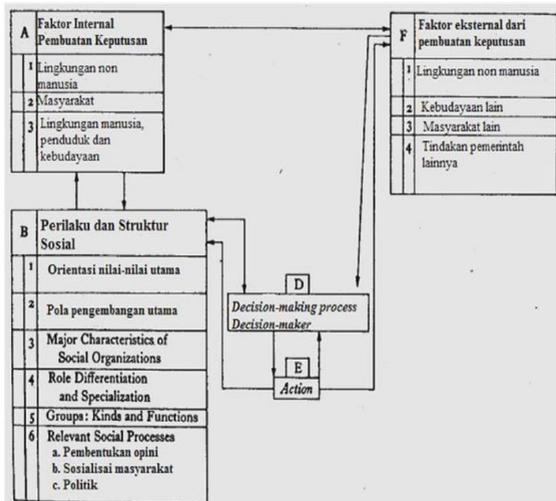
Snyder, Bruck dan Barton menjelaskan kriteria untuk menghubungkan setting dengan hal yang berpengaruh pada pembuatan keputusan yaitu *perception* (harapan awal), *choice* (pilihan), dan *expectation* (harapan). (Snyder *et.al.*, 1962: 203) Untuk memahami pendekatan pembuatan keputusan politik luar negeri, *setting* (faktor-faktor) eksternal dan internal merupakan hal yang harus dipertimbangkan namun bukan menjadi satu-satunya yang dipertimbangkan. Konsep *setting* dapat menjelaskan dimana posisi para pembuat keputusan untuk bertindak dan juga merespon kondisi terkini serta faktor selain individu maupun organisasi pemerintahan yang termasuk kedalam bagiannya. *Setting* internal adalah cara masyarakat diorganisasikan dan berfungsi, seperti politik domestik, opini, sikap

publik, posisi geografis dan kekuatan nasional. Sementara *setting* eksternal adalah kondisi yang ada di luar wilayah negara tersebut seperti aksi dan reaksi dari negara lain (Abubakar Eby Hara, 2011). Dan dalam teorinya menyatakan bahwa faktor-faktor internal dan eksternal mempunyai kedudukan yang sama dan saling mempengaruhi dalam proses pembuatan keputusan luar negeri. Dalam teori Snyder juga mempertimbangkan apakah selama proses pembuatan keputusan yang diambil sudah sesuai dengan situasi terkini atau situasi tertekan, krisis ataupun beresiko (Perwita dan Yani, 2005: 64).

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor internal dan eksternal, para pembuat kebijakan berusaha menyeimbangkan faktor tersebut dalam perumusan kebijakan luar negeri. (Budiana, 2015)

Jadi dapat disimpulkan bahwa banyaknya variabel dapat mempengaruhi aktor dalam mengambil keputusan. Dengan maksud bahwa kerangka variabel ialah faktor internal dan eksternal, serta tatanan sosial dan perilaku. Kemudian variabel tersebut dibagi menjadi beberapa poin, yang membuat teori tersebut menjadi lebih kompleks.

Gambar 1. 1 Konsep Pembuatan Kebijakan



Sumber: Richard C. Snyder, H.W. Bruck, and Burton Sapin (eds), (1962) *Foreign Policy Decision-Making : An Approach to the Study of International Politics*, New York: The Free Press

Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi para aktor pembuat keputusan yang nantinya akan memilih kebijakan yang paling tepat. Dan disisi lain, *Decision Making* memiliki model-model yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan yaitu (Afinotan, 2014, hal. 252-255):

1. *Rational Actor Model*

Pada model aktor rasional pilihan terhadap kebijakan luar negeri merupakan produk ideal. Hal ini didasari karena dalam mengambil keputusan merupakan langkah yang harus mempertimbangkan tujuan kebijakan luar negeri dan dapat menentukan langkah untuk mengambil pilihan yang menjadi prioritas di antara lain. Kedua, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai pilihan tersedia. Selanjutnya pembuat keputusan akan menghitung nilai yang diharapkan dari setiap alternatif, membandingkan semua alternatif, dan memilih alternatif yang memaksimalkan *benefit* dan meminimalkan *cost*. Pada akhirnya aktor rasional akan memikirkan ulang kembali mengenai *cost-benefit* yang akan di dapatkannya sebelum keputusan tersebut bersifat keputusan akhir.

2. *The Bounded Rationality Model*

Model ini memberikan solusi dimana dalam pengambilan keputusan kekurangan dari maksimalisasi *benefit* bisa menjadi hambatan. Contohnya, apabila pembuat keputusan mencari pilihan alternative yang terbaik namun tidak dapat mempertimbangkan semua alternative yang ada. Jadi dengan ini pembuat keputusan akan mempersempit pilihan dengan pertimbangan yang lebih menjanjikan dan lebih masuk akal.

3. *The Bureaucratic Politics Model*

Model dari politik birokrasi di dalamnya pembuat keputusan adalah lembaga pemerintah. Pengambilan keputusan dalam model ini adalah proses untuk mendapatkan kekuasaan pada pemerintahan. Strategi untuk membangun koalisi antar biro mungkin terjadi dalam model ini. Sistem persekutuan atau koalisi ini dalam perjuangan juga untuk mendapat pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan model *Rational Actor*, dengan melihat bahwa negara sebagai aktor utama yang akan berperan dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, dengan mempertimbangkan keamanan nasional dan kepentingan nasional yang menjadi hal utama dalam penyusunan pembuatan kebijakan luar negeri. Melalui model ini pula akan di analisis dari pilihan yang telah dibuat oleh Negara dengan mempertimbangkan *cost* dan *benefit* untuk mencapai kepentingannya.

Untuk mendapatkan jawaban analisa dari persoalan Jepang masih melanjutkan kerja sama pengembangan SDM melalui IM Japan dapat ditelaah melalui teori pembuatan keputusan. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan pemerintah Jepang yang diambil setelah menghadapi beberapa masalah. Dalam mencapai kepentingan nasionalnya Jepang melakukan kerja sama

internasional dibidang kerja sama ketenagakerjaan dimana hal ini dilakukan untung menyokong pertumbuhan ekonomi Jepang yang juga bergantung kepada sumber daya manusia. Jepang memiliki 3 opsi yang dapat dipertimbangkan untuk pertumbuhan ekonominya yaitu dengan sumber daya manusia di negaranya sendiri atau memilih dengan mendapat kiriman sumber daya manusia dari negara lain.

Pada opsi pertama yaitu dengan sumber daya manusia negaranya sendiri mendapatkan keuntungan berupa tenaga kerja yang lebih kompeten atau lebih terjamin. Sedangkan nilai minus dari opsi ini adalah fenomena yang saat ini terjadi di Jepang, yaitu *Aging Population* yang mempengaruhi jumlah para perkerja di Jepang dengan permasalahan usia yang tidak. Pada opsi kedua dengan mendapatkan kiriman sumber daya manusia dari negara lain, Jepang mendapatkan keuntungan yaitu melalui hal ini pemerintah Jepang dapat mengatasi masalah *Aging Population* yang terjadi di negaranya, selain itu dengan menggunakan sumber daya manusia yang sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan hal ini dianggap oleh Jepang dapat mempermudah di dunia kerja karena para tenaga kerja dapat bekerja secara fleksibel dan dengan upah yang jauh lebih murah dibandingkan dengan tenaga kerja dari negaranya sendiri. Tetapi, opsi ini juga memiliki kekurangan yaitu tenaga kerja asing tidak

sebanding dengan tenaga kerja domestic yang lebih kompeten karena sebagian tenaga kerja asing masih terhalang dalam hal bersikap dan berbudaya, serta opsi ini sangat bergantung dari minat masyarakat untuk bekerja di negara lain. Dan opsi ketiga adalah dengan memperbaharui Undang-Undang tenaga kerja asing yang akan melindungi tenaga kerja asing di Jepang menjadi lebih ketat, tetapi nilai minus dari hal tersebut adalah semakin susah nya tenaga kerja asing yang akan masuk ke Jepang karena mengalami persyaratan yang cukup banyak.

Dengan teori pengambilan keputusan dapat dilihat bahwa Jepang sangat mempertimbangkan hal yang harus dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional negaranya. Karena Jepang merupakan negara yang sangat bergantung dari produk industri yang membutuhkan tenaga kerja dari sumber daya manusia dan hal ini yang akan membawa negaranya kepada pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Menurut Perdana Menteri, Shinzo Abe, fenomena *Aging Population* merupakan ancaman yang akan membahayakan ekonomi Jepang kedepannya, oleh karena itu pemerintah Jepang melakukan usaha dengan mendapatkan sumber daya manusia dari negara lain. Hal ini menguntungkan Jepang karena dapat mengatasi fenomena *Aging Population*, mendapatkan tenaga

kerja yang fleksibel dengan upah yang lebih rendah dibandingkan tenaga kerja negaranya dan keamanan negara dari ancaman jumlah tenaga kerja asing yang melonjak tinggi lebih terjamin.

D. Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah ditelaah, maka dapat ditarik hipotesa bahwa :

Kerja sama pengembangan sumber daya manusia dalam program IM Japan adalah karena adanya kepentingan mempertahankan perkembangan ekonomi negaranya yang ditopang oleh tenaga kerja asing. Dengan keuntungan dari para tenaga kerja dari usia produktif yang dapat mengatasi fenomena *aging population* yang terjadi di dalam negaranya, jumlah gaji tenaga kerja Indonesia yang akan dibayarkan jauh lebih rendah dibandingkan gaji tenaga kerja Jepang dan memperbaharui Undang-Undang untuk perlindungan tenaga kerja menjadi lebih terjamin serta dapat terlindungi secara hukum.

E. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan kali ini penulis ingin menunjukkan tujuan dari penelitian. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah untuk menjawab pokok permasalahan dengan menggunakan landasan teori berdasarkan hasil data dan untuk mengetahui alasan Jepang tetap melanjutkan kerja sama sebagai mitra dalam Program IM Japan. Dan

untuk mengetahui dan mendeskripsikan kerja sama Jepang dengan Indonesia dalam pengembangan sumber daya manusia studi kasus pelatihan kerja.

F. Jangkauan Penelitian

Sebuah penelitian haruslah memiliki batasan atau jangkauan. Hal ini dimaksudkan agar objek menjadi jelas dan spesifik, kajian dan wacana tidak melebar dari wacana yang telah ditetapkan. Sehingga, dengan adanya batasan penelitian maka tidak terdapat kerancuan dalam pengertian dan dalam wilayah persoalan. Batasan yang digunakan oleh peneliti adalah mengenai bagaimana IM Japan dimanfaatkan Jepang untuk melanjutkan menjalin kerja sama pengembangan sumberdaya manusia. Dan dengan menggunakan data-data dari tahun 2010 hingga 2019.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis analisa Kualitatif dimana penulis menganalisis data sekunder yang kemudian dengan menggunakan teori dan konsep yang dapat digunakan untuk menjelaskann suatu fenomena atau kejadian yang sedang di teliti oleh penulis. Dengan metode ini penulis akan mendeskripsikan alasan Jepang memilih menjalin kemitraan dengan Indonesia melalui program magang atau pelatihan kerja ke Jepang. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah studi

literatur yaitu mencari dan membaca buku-buku, laporan jurnal, artikel, tabloid, koran, dan data-data internet baik nasional maupun internasional.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu:

Bab I, berisi atas latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang bagaimana sejarah dan jalannya hubungan bilateral antara Jepang dengan Indonesia.

Bab III, berisi tentang definisi IM Japan, persyaratan yang harus dipenuhi untuk masuk ataupun mengikuti program ini, sistem ketenagakerjaan Jepang serta kendala dalam program pemagangan IM Japan.

Bab IV, berisi analisis alasan keberlanjutan dalam program pemagangan melalui IM Japan walaupun memiliki beberapa kendala.

Bab V, berisi penarikan uraian atau kesimpulan dari penelitan yang telah disampaikan di atas.